

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Nama Penulis / Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan Penelitian
1.	Akuntansi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Sumba Timur	Karebu bersama teman-teman (2024)	Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran Belis dalam pengukuran dan pengkomunikasian akuntansi dengan pendekatan nilai wajar (fair value) sesuai harga pasar saat Belis terjadi. Menggunakan metode kualitatif studi kasus dan wawancara dengan tokoh adat di Sumba Timur, hasil penelitian menunjukkan bahwa Belis berupa aset seperti kuda, kerbau, dan uang tunai memiliki peran penting dalam sistem perkawinan adat. Praktik akuntansi Belis mencakup pencatatan, pengelolaan, dan redistribusi aset, mencerminkan keterkaitan antara budaya lokal dan praktik akuntansi tradisional yang relevan dalam konteks ekonomi modern. Temuan ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan teori akuntansi berbasis budaya.	Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang praktik budaya Belis di NTT. Perbedaannya yaitu saya meneliti tentang bagaimana metode akuntansi budaya dapat digunakan untuk menganalisis ketidaksetaraan ekonomi dan dampak sosial yang timbul dari praktik Belis. dimana ini merupakan salah satu hal yang belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga membedakannya dari penelitian lain. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur secara kuantitatif, melainkan berupaya menggali makna, pengalaman, serta persepsi masyarakat terhadap praktik Belis dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, pasangan perkawinan, tokoh masyarakat,

				pengamat budaya dan pemerintah lokal. Analisis dilakukan dengan triangulasi data dari wawancara, dokumentasi dan observasi.
2.	Konsep Belis dan Paca Pada Adat NTT Dilihat dari Sudut Pandang Akuntansi (Khususnya di Pulau Adonara).	Taher, Siti Qamariah (2020)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan struktur sosial, budaya, dan ekonomi Pulau Adonara dengan memasukkan penerapan konsep akuntansi dalam kegiatan Belis dan Paca di Pulau Adonara Flores Timur dan untuk mengetahui kegiatan Belis dan Paca yang dapat mempengaruhi adat istiadat di Pulau Adonara.	
3.	Akuntansi Belis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kabupaten Sikka : (Studi Kasus Adat Perkawinan Masyarakat Desa Watugong). Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi	Renata Ritarosana Dua Pona, Wilhelmina Mitran, & Paulus Libu Lamawita k. (2024).	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang identifikasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi Belis dalam adat perkawinan masyarakat Desa Watugong. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka mengenai tahapan Belis dalam adat perkawinan masyarakat Desa Watugong. Penelitian ini menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai akuntansi. Hasil penelitian ini: identifikasi dalam Akuntansi dikatakan relevan karena dalam proses pembelian transaksi ekonomi dapat diidentifikasi; Penelitian ini menunjukkan proses pengukuran Belis, diukur dengan menggunakan nilai wajar, yaitu sesuai dengan harga pasar yang ditetapkan pada saat itu; Peneliti menyajikan uraian jurnal dan ringkasan keuntungan atau kerugian dari kedua belah pihak,	

			yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk proses pembelian selanjutnya	
--	--	--	---	--

2.1.2 Kajian Teori

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2018), akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi identifikasi mencakup proses pemilihan transaksi atau peristiwa ekonomi yang relevan untuk dicatat. Akuntansi merupakan suatu seni yang melibatkan proses sistematis mulai dari pengumpulan, pengenalan, pengelompokan, hingga pendokumentasian transaksi keuangan berdasarkan urutan kejadian sebenarnya, dengan tujuan utama untuk menyusun laporan keuangan yang informatif dan dapat dipercaya (Sumarsan, 2013). Laporan ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan kinerja organisasi, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan penting bagi para pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, kreditor, dan regulator dalam mengambil keputusan ekonomi. Akuntansi juga dapat dipahami sebagai seni penyediaan jasa yang bertujuan mengubah data mentah keuangan menjadi informasi yang bermakna dan relevan bagi proses pengambilan keputusan dalam suatu entitas ekonomi (Sirait, 2014). Dalam hal ini, akuntansi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan pertimbangan profesional dalam menafsirkan dan menyajikan data agar informasi yang dihasilkan mampu mencerminkan kondisi sebenarnya dari suatu entitas secara objektif dan transparan.

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2019) Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan data dan laporan keuangan mengenai kondisi ekonomi dan aktivitas suatu perusahaan, serta berfungsi sebagai bahasa komunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, seperti manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Melalui akuntansi, informasi keuangan disajikan secara sistematis dan dapat digunakan untuk memahami kinerja serta posisi keuangan perusahaan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Seiring dengan pertumbuhan dan peningkatan kompleksitas organisasi, kebutuhan akan layanan akuntansi yang andal, akurat, dan relevan juga semakin meningkat, menjadikan akuntansi tidak hanya sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pelaporan keuangan.

2.1.2.2 Jenis Akuntansi

Menurut Mardiasmo (2009) Secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor swasta atau komersial dan akuntansi sektor publik.

1. Akuntansi Komersial atau Swasta

Menurut Hendriksen dan Breda (1992) Akuntansi komersial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas bisnis (perusahaan) yang mencari keuntungan atau laba. Dalam akuntansi komersil, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanaman modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut, seperti pemerintah untuk kepentingan pajak.

2. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Ratmono, D., & Sholihin, M. (2015) Akuntansi keuangan daerah atau akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Menurut Erlina, Omar Sakti Rambe, & Rasdianto. (2015) Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah, atau universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat.

2.1.2.3 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik khusus karena mengelola sumber daya keuangan dalam jumlah besar. Berbeda dengan entitas bisnis komersial yang berorientasi pada pencapaian laba, organisasi sektor publik tidak berfokus pada keuntungan meskipun menjalankan aktivitas ekonomi dan keuangan yang serupa (Biduri, 2018). Organisasi sektor publik mengelola dana publik untuk mencapai tujuan sosial dan pelayanan masyarakat, bukan untuk memperoleh keuntungan. Akuntansi yang digunakan dalam konteks ini dikenal sebagai akuntansi sektor publik, yaitu cabang akuntansi yang berfokus pada pengelolaan keuangan negara dan menggunakan pendekatan akuntansi serta mekanisme pengawasan dalam pengelolaan dana publik (Bastian, 2006). Dalam praktiknya, akuntansi sektor publik menitikberatkan pada pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel, dengan tujuan utama memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu sistem pengelolaan keuangan yang mendukung organisasi

publik dalam membuat keputusan yang bertujuan untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan layanan publik.

2.1.2.4 Akuntansi Sosial (Social Accounting)

Akuntansi sosial adalah bidang akuntansi yang diterapkan pada lembaga makro yang melayani perekonomian nasional, khususnya untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba, dan banyak digunakan oleh sektor publik seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan universitas. Menurut Crowther (2011:59), akuntansi sosial merupakan proses penyampaian informasi terkait dampak sosial dan aktivitas ekonomi organisasi kepada kelompok tertentu dan masyarakat secara luas, dan meskipun sering dikaitkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), penerapannya juga relevan bagi organisasi non-profit seperti LSM dan instansi pemerintah. IAI (2016) menyebut akuntansi sosial dengan istilah lain seperti akuntansi lingkungan, pelaporan sosial perusahaan, atau akuntansi keberlanjutan, yang semuanya merujuk pada komunikasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Belaoui (2011:349) menjelaskan bahwa akuntansi sosial adalah proses sistematis yang mencakup pemilihan variabel, metode, dan prosedur untuk mengukur kinerja sosial perusahaan serta menyajikan informasi tersebut kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

2.1.3 Budaya

Menurut Koentjaraningrat (2009), kata "budaya" berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu "kulturah" atau "bodhi," yang berkaitan dengan kecerdasan, akal budi, atau nalar, dan mencerminkan keseluruhan cara hidup suatu kelompok atau masyarakat, termasuk

keaktivitas, selera estetika, kemauan, dan etos kerja mereka. Istilah "kreasi" menggambarkan kemampuan individu dalam memanfaatkan imajinasi untuk menghasilkan karya seni, musik, sastra, atau bentuk ekspresi lainnya, sementara "rasa" mencerminkan pandangan kolektif masyarakat terhadap keindahan dalam berbagai bentuk seperti seni dan arsitektur. "Kehendak" mencerminkan pandangan masyarakat terhadap diri mereka sendiri dan makna hidup, sedangkan "kerja keras" mencerminkan hasil dari kemampuan serta ekspresi kreatif manusia. Budaya juga dipahami sebagai warisan turun-temurun yang membentuk identitas dan karakter kolektif suatu masyarakat, mencerminkan nilai-nilai, norma, dan standar sosial yang tersembunyi, serta menjadi media untuk mengekspresikan kreativitas. Selain itu, budaya memiliki ciri khas berupa keterkaitan kolektif, hasil interaksi sosial yang alami, serta unsur-unsur historis, kepercayaan, perilaku, dan bahasa yang membedakan satu kelompok sosial dari kelompok lainnya.

2.1.3.1 Tradisi Perkawinan Adat Malaka (Dawan R)

Perkawinan adat dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan tata cara kebiasaan masyarakat setempat, di mana prosesi ini selalu berlangsung dalam suasana sakral yang mencerminkan kepercayaan masyarakat pada adat istiadat yang diwariskan turun-temurun (Laudasi et al., 2020). Proses perkawinan biasanya melibatkan beberapa tahap, seperti pengenalan, peminangan, pertunangan, dan perkawinan, yang masing-masing memiliki makna dan nilai tersendiri, terutama di tengah keragaman budaya yang ada (Yulianthi, N. 2017). Di masyarakat NTT, istilah Belis dalam tata cara perkawinan adat masih dilestarikan dan mencerminkan nilai-nilai luhur nenek moyang yang menjadi jati diri dan karakter masyarakat setempat (Mataradja, 2021; Jovani, 2020).

Dalam perspektif kebudayaan, perkawinan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan utamanya, di mana makna-makna dalam tahapan perkawinan menjadi unsur penting bagi manusia sebagai pelaku budaya. Dengan demikian, budaya Belis dan tata cara perkawinan adat tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai penghubung antara generasi dan identitas masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat (2009), Tradisi perkawinan adalah segala suatu yang berkaitan dengan perkawinan entah berupa upacara, adat-istiadat yang telah menjadi kebiasaan yang telah ada sejak lama, diwariskan dan masih dilakukan hingga saat ini. Pada masyarakat Malaka tradisi perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan wajib dilaksanakan dengan upacara yang tidak meninggalkan nilai dari adat-istiadat dan juga nilai Ketuhanan. Sehingga "*Belis*" sendiri sudah merupakan suatu tradisi dalam sebuah perkawinan yang lahir, hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat setempat yang terus-menerus dilangsungkan dan tak pernah ditiadakan dalam upacara adat perkawinan pada hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur lebih spesifik dalam penelitian ini ialah pada tradisi "*Belis*" masyarakat Malaka yang menjadikannya terus ada hingga kini.

2.1.3.2 Belis

Menurut Benu (2003), Belis merupakan bagian dari sistem perkawinan adat di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya pada masyarakat yang menganut tradisi kekerabatan patrilineal, di mana pihak laki-laki memberikan mas kawin berupa hewan, uang, atau barang berharga kepada keluarga perempuan sebagai syarat sah pernikahan. Dalam budaya masyarakat Dawan, Belis yang juga disebut maskawin atau mahar ini adalah hak mutlak calon mempelai wanita dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mempelai pria sebelum akad nikah, baik secara tunai maupun utang, sebagai lambang

tanggung jawab terhadap calon istrinya (Benu, 2003). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Belis adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan saat melamar, yang dalam praktiknya bermakna sebagai tanda terima kasih atas pengorbanan keluarga perempuan dan simbol penerimaan hubungan kekeluargaan baru. Secara simbolis, Belis merepresentasikan penghormatan terhadap keluarga perempuan, pengakuan atas peran mereka dalam membesarkan anak perempuan, serta penguatan ikatan sosial antar dua keluarga besar yang disatukan oleh pernikahan (Benu, 2003).

Menurut Lasi (2019), Pada pernikahan adat masyarakat NTT Kabupaten Malaka (Dawan) dikenal adanya empat tahapan hingga pernikahan dianggap sah secara adat. Pertama, *Tam Toet* atau disebut juga dengan tahap pengenalan dalam tahap ini calon suami tanpa keluarga didampingi oleh juru bicara atau dalam bahasa daerah disebut *Atoen Mnanasi/ hau nanet*, untuk menyampaikan maksud kedatangan kepada keluarga perempuan, yakni untuk meminang calon istrinya. Kedua, tahapan dilanjutkan dengan *Fut Manus* yakni, secara simbolis menggantungkan anting emas kepada calon istri hal ini sebagai tanda bahwa keduanya sudah tidak dapat menjalin hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, ada tahapan *Babua Tok Mesek* dimana keluarga besar laki-laki datang mengunjungi keluarga perempuan, serta melakukan diskusi perihal jumlah dan bentuk Belisnya. Tahapan terakhir yakni, *Tetam Belis* sebagai tahap penghantara Belis pernikahan adat dinyatakan sah dengan diberikannya *Manus,puha* (sirih pinang) yang didalamnya berisi uang yang sudah ditentukan dan barang-barang seperti dulang berisi perlengkapan perempuan seperti make up dan kain-kain adat dan barang bawaan lainnya oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan.

Menurut Kleden (2006), dalam perkembangan zaman, Belis sering kali menjadi beban ekonomi yang berat bagi pihak laki-laki, terutama dalam kondisi ketimpangan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berdampak pada munculnya hutang, eksploitasi tenaga kerja, hingga penundaan atau pembatalan pernikahan. Pergeseran makna Belis ini tampak dalam berbagai media, seperti artikel Ovan Wangkut (2015) di Flores yang menyebut bahwa Belis kini lebih dipahami sebagai transaksi jual beli karena dikonversi dalam bentuk uang, yang menyebabkan banyak keluarga terlilit hutang. Pemberitaan Kompas (2010) juga menunjukkan bahwa tingginya Belis menjadi penyebab kehamilan di luar nikah karena pasangan tidak mampu menikah secara adat, sementara tulisan Bagong Suyanto (2018) di Geotimes menegaskan bahwa Belis bahkan bisa menjadi sumber kekerasan dalam rumah tangga dan dianggap lebih kuat dari institusi gereja. Artikel lainnya dari Merdeka (2015) menggambarkan Belis sebagai tradisi yang mencekik pihak laki-laki dan memicu banyak kasus kehamilan di luar nikah, sedangkan Antonius Rahu (2016) dalam Flores Editorial menyatakan bahwa praktik Belis di Manggarai cenderung bersifat transaksional melalui proses tawar-menawar antar keluarga. Dalam perspektif lain, meskipun Belis memiliki makna simbolis dan fungsi penting seperti penentu sahnya pernikahan, penguat hubungan antar keluarga, penanda bahwa perempuan telah keluar dari keluarga asal, serta sebagai penambah status sosial pihak laki-laki (Neonnub & Habsari, 2018), pergeseran makna yang dilaporkan berbagai media seperti dalam tulisan Nuwa (2019) di Flores Muda, menunjukkan bahwa Belis kini juga dapat dilihat sebagai bentuk penjajahan ekonomi baru yang berkontribusi terhadap kemiskina

Ada beberapa dampak yang didapat pada saat *Belis* telah diberikan. Ada dampak positif dan negatif.

1. Dampak positif pemberian *Belis*

- a. Pemberian *Belis* dapat mengangkat martabat keluarga mempelai laki-laki, karena dianggap mampu memenuhi tuntutan *Belis* yang ditetapkan oleh keluarga mempelai perempuan.
- b. Keluarga mempelai perempuan merasa dihormati. *Belis* dimaknai sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan, perjuangan, dan kasih sayang orang tua dalam membesarkan putri mereka hingga dewasa.
- c. Terjalannya hubungan kekerabatan baru. *Belis* menjadi simbol pengikat yang menghubungkan keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan. Pemberian *Belis* menandakan restu dari orang tua dan keluarga bagi kedua mempelai untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.

2. Dampak negatif pemberian *Belis*

- a. Potensi merendahkan martabat perempuan. Dalam beberapa kasus, pihak laki-laki yang telah membayar *Belis* merasa memiliki kebebasan berlebihan terhadap istrinya, sehingga mengurangi penghargaan terhadap martabat perempuan dalam rumah tangga.

- b. Rasa malu pada pihak laki-laki. Apabila keluarga laki-laki tidak mampu membayar Belis, maka calon mempelai laki-laki biasanya tinggal di rumah keluarga perempuan dan bekerja untuk mereka. Kondisi ini kadang menimbulkan kesan bahwa status perempuan lebih tinggi, sehingga memunculkan rasa malu pada pihak laki-laki.
- c. Potensi konflik antar keluarga. Perbedaan pandangan atau tuntutan Belis yang terlalu tinggi dapat memicu pertentangan antara kedua belah pihak.
- d. Timbulnya utang piutang. Ketidakmampuan membayar Belis sering mendorong keluarga laki-laki untuk meminjam uang, yang berujung pada beban utang.
- e. Eksploitasi tenaga kerja laki-laki sering kali dipaksa bekerja lebih keras atau merantau untuk mengumpulkan uang Belis.
- f. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Dalam beberapa kasus, perempuan yang menerima Belis dalam jumlah besar dianggap sebagai "hak milik" suami, yang meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga (Suyanto, 2018).
- g. Meningkatnya angka pernikahan dini Keluarga miskin cenderung menikahkan anak perempuan mereka lebih cepat untuk mendapatkan Belis, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan pendidikan perempuan.

2.1.3.3 Ketidaksetaraan Ekonomi dan Dampak Sosial Akibat Praktik Belis

Menurut Todaro dan Smith (2015), Ketidaksetaraan ekonomi merupakan kondisi di mana terjadi perbedaan yang signifikan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi di masyarakat. Teori ketidaksetaraan ekonomi banyak dikaji dalam ilmu ekonomi dan sosiologi, beberapa peneliti mengstakan bahwa:

1. Perspektif Karl Marx

Marx berpendapat bahwa sistem ekonomi kapitalis menimbulkan stratifikasi sosial yang menyebabkan kelompok dengan modal lebih besar memiliki kekuasaan untuk mengendalikan kelompok lainnya. Dalam konteks Belis, ketidaksetaraan ekonomi tercermin dalam perbedaan akses terhadap pernikahan. Keluarga yang lebih kaya dapat dengan mudah memenuhi tuntutan Belis, sementara keluarga miskin sering kali terpaksa berhutang atau bahkan gagal menikah karena tidak mampu membayar Belis yang tinggi (Marx, 1867).

2. Perspektif Fungsionalisme

Pendekatan fungsionalisme, seperti yang dikembangkan oleh Durkheim (1893), melihat ketidaksetaraan ekonomi sebagai sesuatu yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks Belis, nilai Belis yang tinggi dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya. Namun, perspektif ini mendapat kritik karena ketidaksetaraan ekonomi yang terlalu tinggi justru memperkuat siklus kemiskinan dan membatasi mobilitas sosial, terutama bagi laki-laki dari keluarga miskin.

Dalam konteks Belis di NTT, ketidaksetaraan ekonomi berperan dalam menentukan siapa yang dapat menikah dan siapa yang tidak. Keluarga yang memiliki akses ekonomi lebih baik dapat dengan mudah memenuhi tuntutan Belis, sementara keluarga miskin terpaksa berhutang atau bahkan gagal menikah karena tidak mampu membayar Belis yang tinggi. Dalam praktik Belis, ketidaksetaraan ekonomi dapat memperparah kemiskinan karena: Meningkatkan beban ekonomi laki-laki. Pihak laki-laki harus mengumpulkan Belis yang besar sebelum menikah, sering kali menyebabkan mereka

berhutang atau mengalami eksploitasi tenaga kerja, Menghambat pernikahan dan mobilitas social. Laki-laki dari keluarga miskin sulit menikah, yang dapat memperburuk ketimpangan sosial di masyarakat, Memunculkan eksploitasi terhadap perempuan. Dalam beberapa kasus, perempuan dijadikan objek transaksi ekonomi dan pernikahan mereka lebih didasarkan pada nilai Belis daripada kehendak pribadi. Belis dalam masyarakat NTT tidak hanya menjadi alat stratifikasi sosial, tetapi juga salah satu faktor yang memperparah ketidakadilan gender. Perempuan sering kali kehilangan haknya untuk memilih pasangan karena tekanan ekonomi dari Belis.

Menurut Giddens (2009) Korban sosial merujuk pada individu atau kelompok yang mengalami kerugian sosial, ekonomi, atau psikologis akibat sistem atau norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks budaya, korban sosial sering kali muncul sebagai akibat dari ketimpangan struktural yang dilegalkan oleh adat dan tradisi. Dalam kasus Belis, korban sosial dapat berupa:

1. Laki-laki yang kesulitan membayar Belis, sehingga mengalami tekanan ekonomi, stres, atau bahkan gagal menikah.
2. Perempuan yang dijadikan objek transaksi ekonomi, di mana pernikahan lebih didasarkan pada kemampuan keluarga laki-laki dalam membayar Belis daripada kehendak individu.
3. Keluarga yang terjebak dalam siklus hutang akibat tuntutan Belis yang tinggi.

Konsep korban sosial ini penting untuk dikaji dalam penelitian agar dapat menemukan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam praktik Belis di masyarakat NTT.

2.1.3.4 Upaya Mengatasi Ketidakadilan Sosial dalam Belis

Untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh *Belis*, diperlukan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan, seperti:

1. Reformasi adat. Mengurangi besaran *Belis* atau menggantinya dengan bentuk penghormatan simbolis tanpa nilai ekonomi yang memberatkan.
2. Edukasi dan pemberdayaan ekonomi. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif *Belis* serta memperkuat kondisi ekonomi keluarga agar *Belis* tidak menjadi beban yang berlebihan.
3. Keterlibatan pemerintah dan tokoh adat. Menjadikan *Belis* sebagai praktik budaya yang lebih fleksibel dan tidak merugikan pihak tertentu.

Akuntansi publik merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada pengelolaan sumber daya dalam sektor publik, termasuk bagaimana kebijakan dan keputusan ekonomi memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif sosial dan budaya, akuntansi publik tidak hanya mengukur keuntungan finansial tetapi juga dampak sosial dari suatu kebijakan atau tradisi ekonomi tertentu. Dalam kasus *Belis*, perspektif akuntansi publik dapat digunakan untuk:

1. Menganalisis dampak ekonomi *Belis* terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
2. Mengkaji peran pemerintah dalam mengatur atau memberikan solusi terhadap dampak ekonomi dari praktik *Belis*.
3. Menilai apakah ada intervensi kebijakan yang dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi akibat tuntutan *Belis*.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat *Belis* sebagai fenomena budaya, tetapi juga sebagai isu kebijakan ekonomi yang membutuhkan pendekatan multidisipliner.

2.1.4 Akuntansi Publik Perspektif Sosial dan Budaya

Menurut Bastian (2013), Akuntansi publik merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada pengelolaan sumber daya dalam sektor publik, termasuk bagaimana kebijakan dan keputusan ekonomi memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif sosial dan budaya, akuntansi publik tidak hanya mengukur keuntungan finansial tetapi juga dampak sosial dari suatu kebijakan atau tradisi ekonomi tertentu. Dalam kasus *Belis*, perspektif akuntansi publik dapat digunakan untuk: Menganalisis dampak ekonomi *Belis* terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat, mengkaji peran pemerintah dalam mengatur atau memberikan solusi terhadap dampak ekonomi dari praktik *Belis*, menilai apakah ada intervensi kebijakan yang dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi akibat tuntutan *Belis*.

Ada pun Raymond Firth, seorang antropologi Inggris, memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hubungan antara budaya dan akuntansi. Dalam bukunya “Primitive Polynesian Economy” (1939), Firth meneliti bagaimana konsep dan praktik akuntansi digunakan dalam masyarakat Polinesia, khususnya masyarakat Trobriand (Firth, 1939). Firth mendefinisikan akuntansi budaya sebagai sebuah sistem pengetahuan dan praktik yang digunakan oleh masyarakat untuk mencatat, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi dan sosial. Firth menekankan bahwa akuntansi budaya bukan hanya tentang angka dan uang, tetapi juga tentang nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang mendasari praktik akuntansi. Akuntansi yang di praktekkan dalam suatu wilayah Negara sebenarnya tidak terjadi begitu saja secara alamiah, tetapi dirancang dan dikembangkan

secara sengaja untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Akuntansi mempunyai pengertian yang beraneka ragam menurut sudut pandang masing-masing ahli yang membedakan definisi atas akuntansi. Secara umum akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang diharapkan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.4.1 Pengidentifikasian Dalam Akuntansi

Menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2017), Dalam proses akuntansi, tahap identifikasi memiliki tujuan utama untuk mengenali dan mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang memenuhi syarat sebagai transaksi ekonomi. Identifikasi ini merupakan proses selektif yang berfokus pada pemilahan kejadian yang relevan dengan aktivitas ekonomi suatu entitas. Kejadian yang diidentifikasi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu peristiwa non-ekonomi (nontransaksi) dan peristiwa ekonomi (transaksi). Hanya peristiwa ekonomi yang dicatat dalam sistem akuntansi karena memiliki dampak finansial terhadap posisi keuangan entitas.

Sebuah peristiwa dikategorikan sebagai transaksi apabila memenuhi salah satu dari dua kriteria utama. Pertama, peristiwa tersebut menyebabkan perubahan kas baik berupa pemasukan maupun pengeluaran yang berdampak langsung terhadap kondisi keuangan, misalnya menghasilkan keuntungan atau menimbulkan kerugian. Kedua, transaksi tersebut dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan moneter, sehingga memungkinkan pencatatan secara sistematis dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, akuntansi hanya mencatat kejadian-kejadian yang berdampak nyata terhadap kondisi keuangan perusahaan dan yang dapat diukur dengan nilai uang. Oleh karena itu, tahap

identifikasi menjadi sangat krusial sebagai dasar dalam menjamin bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat relevan, dapat dipercaya, dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.4.2 Pengukuran dalam Akuntansi

Dalam akuntansi, pengukuran diartikan sebagai pemberian nilai numerik pada objek atau peristiwa tertentu untuk merepresentasikan atribut-atributnya (Nigroom, 2002). Pengukuran merupakan proses penentuan nilai moneter yang digunakan untuk menilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini juga mencakup pemilihan dasar pengukuran yang tepat.

PSAK Nomor 1 tahun 2013 menjelaskan bahwa pengukuran adalah proses untuk menentukan nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang diperlukan guna menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan mudah dimengerti. Penilaian dalam akuntansi adalah proses memberikan angka numerik pada objek atau peristiwa tertentu untuk menggambarkan atribut-atribut tertentu. Prinsip dasar dalam penilaian umumnya mencakup biaya historis dan nilai wajar.

1. Biaya historis merupakan rupiah kesepakatan atau harga pertukaran yang telah ditulis dalam sistem pembukuan. Prinsip historical cost menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal dan biaya, (Soewardjono, 2015). Artinya, aset tetap seperti bangunan, pabrik dan mesin, perabotan, dan lain-lain akan dicatat dalam pembukuan dengan harga yang dibayarkan. Konsep biaya historis adalah konsep pengukuran yang paling memungkinkan untuk mengukur besarnya Belis yang diberikan baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan.

2. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk menukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Nilai wajar (fair value) juga dapat diartikan sebagai harga yang akan diterima dalam penjualan aset atau pembayaran untuk mentransfer kewajiban yang terjadi di pasar pada tanggal pengukuran (Farcane et al., 2011). Konsep fair value pada dasarnya sudah dilakukan oleh orang sumba hanya saja konsep ini dilakukan secara alamiah dan tidak dibahasakan secara terperinci.

2.1.4.3 Pengkomunikasian Dalam Akuntansi

Berdasarkan PSAK No. 1 (2009), laporan keuangan adalah sarana yang digunakan oleh entitas untuk menyampaikan informasi keuangannya kepada pihak luar. PSAK 1 (2009) menekankan bahwa laporan keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang relevan dan tepat bagi para pengguna laporan tersebut. Proses penyampaian informasi melalui laporan keuangan bukan hanya merupakan bagian yang vital, tetapi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik akuntansi secara keseluruhan. Dalam tradisi Belis perkawinan, komunikasi dilakukan melalui penyampaian informasi yang terperinci dalam laporan biaya materi. Laporan ini mencakup pendapatan, pengeluaran, serta selisih atau kelebihan yang dialami oleh pihak laki-laki dan perempuan selama proses Belis. Dengan adanya laporan tersebut, kedua pihak dapat secara transparan memahami kontribusi finansial masing-masing, serta memastikan bahwa semua biaya yang terkait dengan pernikahan dan Belis tercatat dengan jelas. Akuntansi pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari proses penyampaian informasi melalui laporan keuangan. Umumnya, laporan keuangan disusun dengan

berlandaskan asumsi kelangsungan usaha, yaitu bahwa perusahaan akan terus melanjutkan aktivitasnya di masa mendatang.

Karakteristik kualitatif merupakan ciri utama yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan bermanfaat bagi para pengguna (Hastuti, 2012). Empat karakteristik kualitatif utama tersebut meliputi:

1. Dapat dipahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dimengerti oleh pengguna.
2. Relevan informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
3. Andal informasi harus dapat dipercaya (reliable), bebas dari kesalahan material maupun pengertian yang menyesatkan, serta dapat mencerminkan penyajian yang jujur.
4. Dapat dibandingkan – pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antarperiode guna mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan, serta membandingkan laporan antarperusahaan untuk menilai posisi keuangan, kinerja, dan perubahannya secara relatif.

Dalam akuntansi, penyampaian laporan keuangan merupakan tahap penting dalam proses pengkomunikasian informasi. Proses pengkomunikasian ini mencakup pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi (Abdurahim et al., 2009). Penentuan waktu pelaporan menentukan kapan suatu pos akan disajikan, sehingga pencatatan transaksi harus dilakukan sesuai

dengan ketentuan tersebut. Sebelum tahap pelaporan dilakukan, terdapat proses pengukuran dan pengakuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini selaras dengan pernyataan Standar 18 Akuntansi Keuangan (SAK) / PSAK No. 20. tahun 2009 menyatakan bahwa aset adalah sumber daya yang diakui oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

2.1.4.4 Teori Akuntansi Budaya dan Teori Struktural-Fungsionalisme

2.1.4.4.1 Teori Akuntansi Budaya

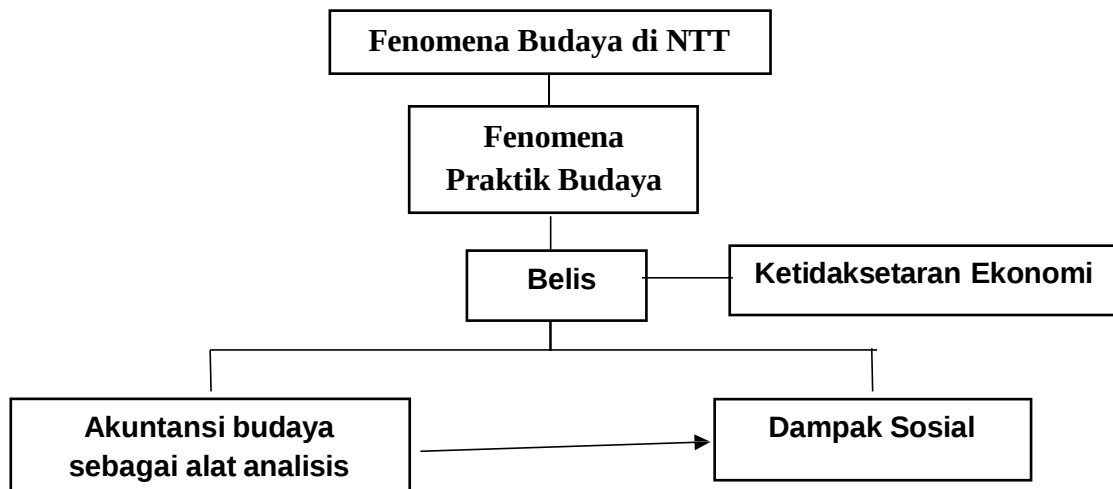
Teori akuntansi budaya merupakan pendekatan yang memahami praktik ekonomi masyarakat tidak hanya dari sisi pencatatan keuangan formal, tetapi juga melalui nilai- nilai budaya lokal yang membentuk pola pikir dan perilaku ekonomi. Menurut Carnegie dan Napier (1996), akuntansi adalah kebiasaan sosial yang tidak terpisahkan dengan budaya masyarakat di mana ia berlangsung. Dalam konteks ini, kebiasaan Belis di Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat dilihat sebagai jenis pertukaran yang reflektif sistem nilai budaya yang kuat dengan konsekuensi ekonomi yang nyata. Kebiasaan Belis, yang dalam prinsipnya adalah pemberian dari pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan sebagai bagian dari pernikahan, memiliki konsekuensi ekonomi yang besar terhadap keluarga pelaku. Melalui pendekatan akuntansi budaya, praktik ini tidak hanya dilihat sebagai tradisi, tetapi juga sebagai bentuk pengeluaran ekonomi yang memengaruhi kondisi keuangan keluarga, distribusi sumber daya, dan bahkan ketimpangan ekonomi.

2.1.4.4.2 Teori Struktural-Fungsionalisme

Teori struktural-fungsionalisme, yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling

berkaitan dan memiliki fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas sosial. Dalam kerangka ini, setiap praktik budaya, termasuk Belis, dipandang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan, keteraturan, dan kelangsungan hidup sosial masyarakat (Parsons, 1951). Dalam konteks NTT, Belis bukan hanya praktik ekonomi, tetapi juga bagian dari struktur sosial adat yang memperkuat hubungan antar keluarga dan mempererat kohesi sosial. Namun, dalam masyarakat yang mengalami dinamika ekonomi dan sosial, fungsi ini dapat berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.

2.1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1.5 Kerangka Teori

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif individu dan komunitas di masyarakat Malaka (Dawan) dalam menghadapi tuntutan Belis, sebuah tradisi perkawinan adat yang memiliki nilai historis dan budaya mendalam. Namun, praktik Belis seringkali menjadi beban ekonomi bagi keluarga, terutama yang kurang mampu, sehingga dapat memperparah kondisi kemiskinan dan menimbulkan dampak sosial seperti konflik antar keluarga atau suku. Dalam konteks ini, akuntansi publik dapat digunakan sebagai alat

analisis untuk memahami bagaimana praktik Belis mempengaruhi distribusi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif individu dan komunitas dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat praktik Belis. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, penelitian ini akan mengungkap makna yang diberikan masyarakat terhadap Belis serta strategi adaptif yang mereka gunakan agar tetap memenuhi tuntutan adat tanpa mengorbankan kesejahteraan ekonomi. Hasilnya diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika sosial-ekonomi masyarakat adat dan menjadi masukan bagi kebijakan publik yang lebih kontekstual dan peka terhadap nilai-nilai budaya lokal.

